

PENGARUH PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP BELANJA LANGSUNG

Rusiati Ningsih
rusiati_ningsih@yahoo.com
Wahidahwati
wahidahwati@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This study is aimed to find out whether Local Own Source Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Funds give influence to the direct expenditure and the Surplus of Financing Budget and Population Growth as the control variable. The research object is all districts / cities in East Java Province. The samples have been selected by using purposive sampling technique, so 35 Districts / Cities in East Java province which have met the criteria have been selected as samples. The data analysis techniques have been done by using multiple linear regressions analysis. Based on the results of analysis it shows that local own source revenue, Surplus of Financing Budget and Population Growth give positive and significant influence to the direct expenditure, General Allocation give significant and negative influence to the direct expenditure, and Special Allocation Fund does not give any influence to the direct expenditure. The predictive ability of these five variables to the direct expenditure is 63.3% while the remaining 36.7% is explained by other variables which are not included in this research.

Keywords: Local Own Source Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Direct Expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pertumbuhan Penduduk sebagai variabel kontrol. Objek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh hasil 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Pertumbuhan Penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Langsung, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Langsung, dan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Kemampuan prediksi dari ke lima variabel tersebut terhadap Belanja Langsung sebesar 63,3% sedangkan sisanya 36,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Langsung

PENDAHULUAN

Teori keagenan dalam sektor publik menggambarkan hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik. Prinsipal dan agen di pemerintahan daerah harus membuat dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sehat tanpa adanya perilaku oportunistik dari pihak prinsipal dan agen. Dengan demikian perlu adanya sistem pengendalian untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan, misalnya dengan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, atau dengan publikasi APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi publik.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Tujuan otonomi daerah yang hendak dicapai baik dalam aspek politik, administratif, dan ekonomi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial melalui pengembangan kehidupan demokrasi serta penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Indraningrum (2011:20)

menyatakan bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut PP No.58 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Konsekuensi dari kebijakan PP No.58 Tahun 2005 adalah suatu kemandirian masing - masing daerah dalam menghasilkan suatu pendapatan yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam upaya perwujudan desentralisasi. Pendapatan tersebut yang antara lain diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil), Pinjaman Daerah, dan lain - lain pendapatan yang sah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Variabel Pendapatan Asli Daerah menjadi variabel independen dalam penelitian ini serta dua variabel independen yang lainnya yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari dari 10% (Rahmawati,2010:3). Hal tersebut bergantung pada kemampuan dan potensi daerah masing - masing. Untuk mengurangi kesenjangan fiskal tersebut transfer dana dari pemerintah pusat diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Kegiatan pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Variabel kontrol yang kedua dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Penduduk. Pertumbuhan Penduduk digunakan sebagai salah satu variabel kontrol karena dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah, apabila perkembangan jumlah penduduk semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar. Karena meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.

Klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dalam penelitian ini menggunakan variabel belanja langsung sebagai variabel dependen karena porsi belanja langsung cenderung lebih besar dibanding belanja tidak langsung dalam belanja daerah. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan pemerintah daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik di sektor privat maupun sektor publik. Para ekonom menggunakan struktur hubungan prinsipal dan agen untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan pekerja (Faria dan Silva,2013).

Sedangkan di sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal – agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Latifah,2010).

Dalam hubungan keagenan di pemerintahan daerah ini yang bertindak sebagai prinsipal adalah lembaga legislatif atau dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan yang bertindak sebagai agen yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam menjalankan hubungan keagenan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD, maka Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai lembaga eksekutif bertugas dalam menyusun anggaran yang terdiri dari pos-pos pendapatan seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah serta pos-pos belanja meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Dimana anggaran tersebut harus disajikan dalam satuan nominal. Selanjutnya tugas DPRD sebagai lembaga legislatif yang bertindak sebagai prinsipal adalah menyetujui atau menolak anggaran yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dimana DPRD juga bertugas mengawasi anggaran sehingga diharapkan anggaran yang telah dibuat akan mampu terealisasi dengan efektif.

Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini menggambarkan bahwa antara prinsipal dan agen perlu membuat dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menghasilkan APBD yang sehat dan tanpa unsur terjadinya perilaku oportunistik baik dari pihak prinsipal maupun pihak agen yang dikarenakan adanya asimetri informasi. Dalam membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu adanya sistem pengendalian untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan, misalnya dengan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, atau dengan publikasi APBD sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi publik.

Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU ini pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten/kota didasarkan pada asas desentralisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pengoptimalisasian sumber pendapatan daerah, pemerataan hasil-hasil pembangunan, dan peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; memilih pimpinan daerah; mengelola aparatur daerah; mengelola kekayaan daerah; memungut pajak daerah dan retribusi daerah; mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang undangan.

Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas (Mardiasmo, 2009:62). Pentingnya anggaran sektor publik karena beberapa alasan yaitu : (1) Anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (2) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*. (3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat." (Mardiasmo, 2004:63).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan terdiri dari: (1) Pendapatan daerah, (2) Belanja daerah, dan (3) Pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2012:101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 terdiri dari : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Alokasi Umum

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Masing – masing daerah memiliki kemampuan berbeda – beda dalam langkah mengoptimalkan pendapatan daerahnya. Sebagian daerah mampu menghasilkan pendapatan daerahnya sendiri melalui pengolahan sumber daya alamnya atau bahkan melalui kegiatan usaha yang lain. Namun sebagian daerah yang lain masih ada yang bergantung terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan program kerjanya. Dengan adanya fenomena tersebut, maka Pemerintah Pusat memberikan Dana Alokasi Umum kepada tiap-tiap daerah yang bertujuan untuk menanggulangi ketimpangan fiskal antar daerah yang disebabkan minimumnya sumber pajak dan potensi alam yang berbeda – beda.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus menurut Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Tujuan pengalokasian Dana Alokasi Khusus adalah untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik kepada suatu daerah tertentu yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mempercepat laju pembangunan daerah yang lebih baik. Dana Alokasi Khusus dapat dikategorikan sebagai *matching grant* karena adanya kewajiban penyediaan dana pendamping dan sekaligus *restricted grant* karena karakternya sebagai *categorical grant-in-aid* (Mardiasmo,2006).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD/APBN selama satu periode pelaporan. Salah satu penggunaan SiLPA menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137, adalah mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung yang dalam hal ini mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto. Selisih

antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto inilah yang disebut sebagai SiLPA (Ardhini,2011:27).

Pertumbuhan Penduduk

Mulyadi (2014:16) menjelaskan Pertumbuhan penduduk adalah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk, meliputi komponen: (1) kelahiran (fertilitas), (2) kematian (mortalitas), (3) migrasi masuk, dan (4) migrasi ke luar. Selisih antara kelahiran dan kematian disebut pertumbuhan alamiah. Sedangkan selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto. Selanjutnya Badan Pusat Statistik, menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

Belanja Langsung

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok Belanja Langsung adalah : (1) Belanja pegawai, untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, (2) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah (3) Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung

Dalam penelitian Fatmawati (2013) menunjukkan bukti empiris bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Selaras dengan penelitian Febriana (2015), juga menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM), dimana belanja modal merupakan unsur dari belanja langsung. Namun dalam penelitian yang dilakukan Wandira (2013), memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal. Berdasarkan beberapa penelitian yang berbeda hasil maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu :

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Belanja Langsung.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung

Seperti yang dikemukakan oleh Indraningrum (2011), bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Selanjutnya didukung dengan penelitian Hidayah dan Setiyawati (2014), menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Kemudian Lestari et al. (2015) juga mengemukakan bahwa besarnya DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat akan mempengaruhi Belanja Langsung. Namun berlawanan dengan kesimpulan yang diungkapkan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa DAU mempunyai arah negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian maka hipotesis yang ingin dikembangkan adalah :

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal yang merupakan salah satu komponen dari Belanja Langsung. Selanjutnya dalam penelitian Hidayah dan Setiyawati (2014), Dana Alokasi Khusus tidak berdampak signifikan terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian Febriana (2015) Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sehingga hipotesis yang dapat dikembangkan yaitu : H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung

METODA PENELITIAN

Pengukuran dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) variabel independen yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. (2) Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (3) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dua variabel kontrol dalam penelitian ini antara lain (1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. (2) Pertumbuhan Penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat penambahan jumlah penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu, serta variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Langsung merupakan jenis belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan. Dengan periode yang diteliti adalah tahun 2011-2015.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari hasil pengumpulan data sekunder, yaitu nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian yang ditunjukkan dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	156	.038	.610	.12849	.092442
DAU	156	.173	.706	.52800	.097038
DAK	156	.001	.118	.04490	.018704
SiLPA	156	.195	1.000	.88923	.175242
PP	156	.001	.017	.00639	.003429
BL	156	.248	.661	.39073	.074796
Valid N (listwise)	156				

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017.

Tujuan untuk memudahkan dalam membaca dan memahami data, maka diperlukan statistik deskriptif mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pertumbuhan Penduduk, dan Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 - 2015.

Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson dengan hasil pengujian yang terdapat dalam tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	Sig. F Change	
1	.795 ^a	.633	.620	.046089	.633	51.643	.000	1.336

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017.

Hasil uji autokorelasi di dalam tabel diatas menunjukkan nilai statistik Durbin Watson (DW) sebesar 1,336 artinya angka DW berada diantara -2 sampai +2 sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Normalitas

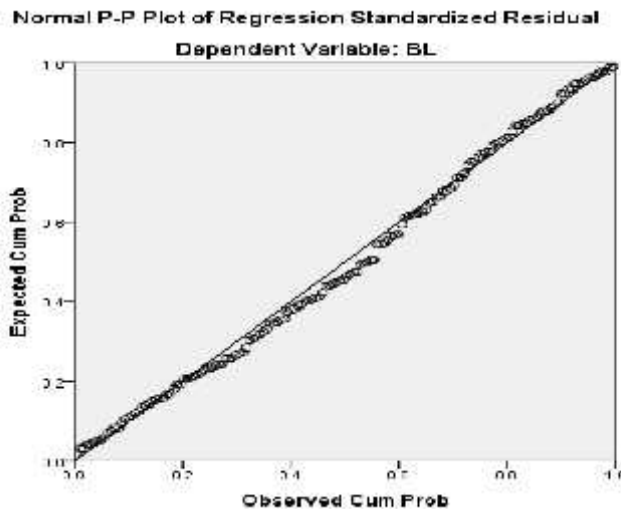
Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Jika hasil dari uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Hasil dari pengujian normalitas berdasarkan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3
Uji Normalitas dengan One Sample Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		156
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.04533996
	Absolute	.052
Most Extreme Differences	Positive	.052
	Negative	-.033
Kolmogorov-Smirnov Z		.650
Asymp. Sig. (2-tailed)		.793

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017.

Nilai *Kolmogorov Smirnov* diperoleh sebesar 0,650 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,793 lebih besar dari 0,05 artinya data terdistribusi normal. Selain dengan melakukan uji normalitas dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*, juga dapat dilakukan dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Data dapat disebut normal jika data atau titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Hasil uji normalitas dengan analisis *normal probability plot* dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1

Normal Probability Plot

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan grafik *normal probability plot* diatas menunjukkan bahwa titik – titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga kesimpulan yang dapat diambil yaitu data dalam model regresi terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinieritas

Adanya multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* . Jika nilai *Tolerance* diatas 0,10 atau nilai VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

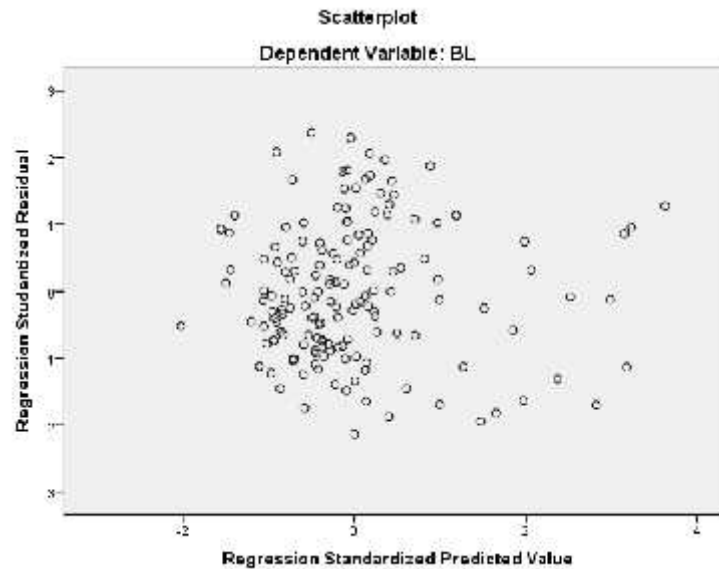
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	0.45	0.038		11.898	0.000		
PAD	0.178	0.045	0.266	3.941	0.000	0.538	1.857
DAU	-0.347	0.056	-0.450	-6.189	0.000	0.463	2.161
DAK	-0.06	0.231	-0.015	-0.258	0.796	0.735	1.36
SiLPA	0.09	0.022	0.210	4.136	0.000	0.946	1.057
PP	3.593	1.137	0.165	3.161	0.002	0.902	1.109

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017.

Berdasarkan hasil pengujian dengan uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4 bahwa variabel PAD, DAU, DAK, SiLPA, dan Pertumbuhan Penduduk, seluruhnya memiliki angka *Variance Inflation Factors (VIF)* dibawah 10 dengan angka *Tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat adanya gejala multikolinieritas antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada gambar berikut :



Gambar 2
Gambar Scatterplot

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017.

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan terlihat bahwa titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak terdapat pola tertentu yang teratur serta data tersebar secara acak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi.

Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas juga didukung hasil analisis Uji *Glejser*. Uji *glejser* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Hasil pengujian heteroskedastisitas terlihat dalam tabel 5 berikut ini :

Tabel 5
Hasil Uji *Glejser*
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.040	.021		1.917	.057
PAD	-.030	.025	-.131	-1.211	.228
DAU	-.039	.031	-.145	-1.246	.215
DAK	-.051	.128	-.037	-.401	.689
SiLPA	.019	.012	.131	1.601	.111
PP	1.034	.630	.137	1.641	.103

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017.

Berdasarkan hasil analisis Uji *Glejser* menunjukkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,228 lebih

besar dari 0,05, nilai signifikansi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,215 lebih besar dari 0,05, untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) nilai signifikansinya sebesar 0,689, selanjutnya nilai signifikansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah 0,111, dan variabel Pertumbuhan Penduduk (PP) nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,103. Sehingga untuk semua variabel independen menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai adjusted R Square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Hasil pengujian *Adjusted R Square* dapat dilihat dalam tabel 6 berikut :

Tabel 6
Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	Sig. F Change	
1	.795 ^a	.633	.620	.046089	.633	51.643	.000	1.336

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017.

Hasil dalam tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,633 atau menunjukkan nilai tersebut mendekati angka 1 (satu) yang artinya bahwa variasi atau perubahan dalam belanja langsung dapat dijelaskan oleh variasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Pertumbuhan Penduduk sebesar 0,633. Dan sisanya sebesar 0,367 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Penyajian hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat dalam tabel 7 berikut :

Tabel 7
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	.450	.038		11.898	.000
	PAD	.178	.045	.266	3.941	.000
	DAU	-.347	.056	-.450	-6.189	.000
	DAK	-.060	.231	-.015	-.258	.796
	SiLPA	.090	.022	.210	4.136	.000
	PP	3.593	1.137	.165	3.161	.002

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017.

Berdasarkan tabel regresi linier berganda, dapat diketahui persamaan regresinya adalah :

$$BL = 0,450 + 0,178 \text{ PAD} - 0,347 \text{ DAU} - 0,060 \text{ DAK} + 0,090 \text{ SiLPA} + 3,593 \text{ PP}$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa : (1) Konstanta sebesar 0,450 artinya nilai ini menunjukkan bahwa probabilitas atau kemungkinan belanja langsung (BL) tanpa dipengaruhi variabel bebas. Artinya, jika seluruh variabel bebas nilainya nol (0) maka jumlah Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,450. (2) Koefisien regresi PAD sebesar 0,178 yaitu nilai koefisien adalah positif, yang menunjukkan adanya hubungan searah antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah Belanja Langsung di Provinsi Jawa Timur. Artinya, jika jumlah Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 10% maka jumlah Belanja Langsung akan meningkat sebesar 1,78% dengan asumsi semua variabel lain bernilai nol. (3) Koefisien regresi DAU sebesar 0,347, nilai koefisien DAU negatif artinya terdapat hubungan berlawanan arah antara jumlah Dana Alokasi Umum dengan jumlah Belanja Langsung. Jika jumlah Dana Alokasi Umum meningkat sebesar 10% , maka jumlah Belanja Langsung akan menurun sebesar 3,47% dengan asumsi semua variabel lain sama dengan nol. (4) Koefisien regresi DAK sebesar 0,060 yang bernilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah antara jumlah Dana Alokasi Khusus dengan jumlah Belanja Langsung. Misalnya saat jumlah Dana Alokasi Khusus meningkat sebesar 10% , maka jumlah Belanja Langsung akan menurun menjadi sebesar 6% dengan asumsi semua variabel lain bernilai nol. (5) Koefisien regresi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) bernilai positif sebesar 0,090 artinya nilai ini mempunyai hubungan searah antara jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan jumlah Belanja Langsung. Dalam hal ini jika jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran meningkat sebesar 10% , maka jumlah Belanja Langsung juga akan meningkat sebesar 9% dengan asumsi semua variabel lain bernilai nol. (6) Koefisien regresi Pertumbuhan Penduduk (PP) menunjukkan nilai positif sebesar 3,593 artinya jika terdapat peningkatan variabel PP sebesar 10% maka akan meningkatkan jumlah Belanja Langsung sebesar 359,3% dengan asumsi variabel lainnya sama dengan nol.

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji ini dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan ketentuan yang digunakan yaitu jika P value (α) < 0,05 maka model tersebut sudah fixed dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Langsung di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 hingga 2015 yaitu sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji *Goodness of Fit*

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.549	5	.110	51.643	.000 ^b
	Residual	.319	150	.002		
	Total	.867	155			

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017.

Dari uji ANOVA atau F-test pada tabel 8 diketahui F hitung sebesar 51,643 dengan p value 0,000 yang berarti p value < 0,05 dari nilai α , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya ada pengaruh yang signifikan atau model regresi ini dapat dipakai untuk menjelaskan alokasi Belanja Langsung.

Uji t

Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t) menunjukkan hasil pengaruh dari beberapa variabel independen (bebas) secara individual terhadap variabel dependen (terikat). Variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen adalah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Pertumbuhan Penduduk. Hasil uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t) disajikan dalam tabel 9 berikut:

Tabel 9
Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.450	.038		11.898	.000
	PAD	.178	.045	.266	3.941	.000
	DAU	-.347	.056	-.450	-6.189	.000
	DAK	-.060	.231	-.015	-.258	.796
	SiLPA	.090	.022	.210	4.136	.000
	PP	3.593	1.137	.165	3.161	.002

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2017.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Langsung

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Hasil pengujian pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur menggunakan uji statistik t mempunyai pengaruh signifikan dengan perhitungan T sebesar 3,941 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa hipotesis H1 diterima artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi jumlah PAD maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Langsung akan semakin besar karena dengan PAD yang besar maka dapat memacu Pemerintah Daerah untuk lebih mengefektifkan program – program baru guna mensejahterakan masyarakat yang tentunya akan memakan banyak dana untuk merealisasikan program yang direncanakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2013) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung, dimana semakin besar Pendapatan Asli Daerah semakin leluasa pula pemerintah daerah dalam menjalankan program – program.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Langsung

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Hasil uji regresi untuk variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 dan memiliki nilai koefisien regresi dengan arah negatif yaitu sebesar $-0,347$ artinya bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Langsung. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak, ini memunculkan arti bahwa semakin meningkatnya jumlah Dana Alokasi Umum maka semakin menurun jumlah Belanja Langsung, begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sugiyanta (2016) yang menyatakan bahwa pengaruh DAU pada belanja modal menunjukkan hasil signifikan dengan arah berlawanan. Menurut Sugiyanta (2016), menyebutkan hal ini dimungkinkan karena DAU

bersifat "*Block Grant*" yang artinya keleluasaannya penggunaa diberikan kepada kepala daerah yang disesuaikan dengan prioritas serta kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Langsung

H3 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Hasil uji regresi untuk variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,796, nilai ini lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H3 ditolak. Artinya bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah Dana Alokasi Umum baik meningkat atau menurun tidak mempengaruhi jumlah Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung karena alokasi Dana Alokasi Khusus di tiap tiap kabupaten/kota berbeda - beda dan penggunaannya hanya untuk kegiatan tertentu saja. Serta Alokasi DAK hanya merupakan residu karena besaran alokasi dana transfer yang lain seperti Dana Alokasi Umum telah ditentukan persentasenya dalam Undang-Undang sehingga penetapannya akan didahulukan daripada Dana Alokasi Khusus. Hal ini sesuai dengan PP No. 55 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa besaran DAK dalam APBN ditentukan setiap tahun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriana (2015) yang menyatakan Dana Alokasi Khusus tidak mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal. Dimana Belanja Modal merupakan salah satu komponen dalam Belanja Langsung.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Langsung

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diketahui bahwa angka signifikansi dari variabel SiLPA adalah sebesar 0,000 yaitu kurang dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) . kemudian untuk hasil koefisien regresi dari SiLPA adalah sebesar 0,090 artinya variabel SiLPA yang berperan sebagai variabel kontrol berpengaruh secara signifikan dengan arah positif terhadap variabel Belanja Langsung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ardini (2011) yang menjelaskan bahwa SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal dimana Belanja Modal adalah salah satu komponen dari Belanja Langsung. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Fatmawati (2013) yang menyatakan bahwa SiLPA secara individual berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Langsung.

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Belanja Langsung

Hasil pengujian pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur menggunakan uji statistik t mempunyai pengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 atau kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan Penduduk sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap Belanja Langsung dengan arah positif artinya semakin tinggi angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur maka semakin tinggi pula jumlah Belanja Langsung. Hal ini membuktikan perkembangan jumlah penduduk semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar. Karena meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka akan semakin besar anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan penduduk dalam suatu daerah. Serta kemungkinan lain dengan peningkatan pendapatan perkapita maka pendapatan pemerintah daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi dari masyarakat juga meningkat. Dengan semakin tingginya nilai pendapatan daerah maka mendorong pemerintah daerah untuk

meningkatkan belanja langsung. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tania (2013) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah dan jumlah penduduk secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Yang diketahui bahwa belanja modal merupakan komponen belanja langsung.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Serta mengetahui pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Pertumbuhan Penduduk sebagai variabel kontrol. Simpulan dari penelitian ini adalah : (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada periode 2011 - 2015 artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka jumlah Belanja Langsung Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur juga akan meningkat. (2) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Langsung artinya bahwa semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka berpengaruh terhadap penurunan jumlah Belanja Langsung. (3) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap perubahan jumlah Belanja Langsung Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2011 - 2015 artinya bahwa peningkatan / penurunan jumlah Dana Alokasi Khusus tidak mempengaruhi perubahan jumlah Belanja Langsung. (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Artinya pada saat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun lalu yang menjadi komponen penerimaan pembiayaan meningkat maka jumlah Belanja Langsung juga meningkat. (5) Pertumbuhan Penduduk menunjukkan pengaruh positif antara Pertumbuhan Penduduk terhadap Belanja Langsung. Dengan demikian menunjukkan bahwa angka Pertumbuhan Penduduk meningkat maka dapat menaikkan jumlah Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Saran

Dari hasil penelitian diperlukan perbaikan serta pengembangan dalam penelitian selanjutnya, berikut saran yang dapat diberikan antara lain : (1) Pemerintah Daerah sebaiknya lebih meningkatkan kinerja instansi sehingga diharapkan akan menaikkan sumber penerimaan daerah agar pengalokasian anggaran ke Belanja Langsung untuk program kegiatan pelayanan publik juga dapat meningkat. (2) Untuk penelitian selanjutnya, dengan menggunakan variabel yang sama dapat memperluas objek penelitian dengan menggunakan objek tambahan diluar Provinsi Jawa Timur misalnya seluruh Provinsi di Indonesia. (3) Menambahkan jangka waktu penelitian untuk membuktikan konsistensi hasil penelitian sehingga hasil penelitian bisa menjadi lebih relevan. (4) Penambahan variabel baru untuk penelitian selanjutnya sangat penting dilakukan agar hasil penelitian yang baru dapat melengkapi hasil penelitian terdahulu, variabel yang dapat ditambahkan seperti Dana Bagi Hasil dan variabel Luas Wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Faria, J. A. D., dan Silva, S. 2013. The effects of information asymmetry on budget slack: An experimental research. *African Journal of Business Management*, 7(13): 1086-1099.
- Fatmawati, S. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Langsung. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 2 (7).

- Febriana, I. S. 2015. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4 (9): 1 – 22.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Hidayah, S. dan H. Setiyawati. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi XVIII* (01): 45 – 58.
- Indraningrum, T. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Langsung. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Latifah, N. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik?. *Fokus Ekonomi* 5(2): 85-94.
- Lestari, N. N. S.A., I. W. Bagia, dan G. P. A. S. Jana. 2015. Pengaruh APBN terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha* 3.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2006. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Serial Otonomi Daerah. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi, S. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Prespektif Pembangunan*. Edisi Revisi Lima. Rajawali Pers. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
_____. Nomor 58 Tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005. Jakarta.
_____. Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. 22 Oktober 2012. Jakarta.
- Rahmawati, N. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sholikhah, I., dan Wahyudin, A. 2014. Analisis Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa. *AAJ* 3(4): 553-562.
- Sugiyanta. 2016. Analisis Belanja Modal dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 14 (1): 20 – 35.
- Tania, A.L. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
_____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Jakarta.
- Wandira, A. G. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* 2 (1).